

BAB I PENDAHULUAN

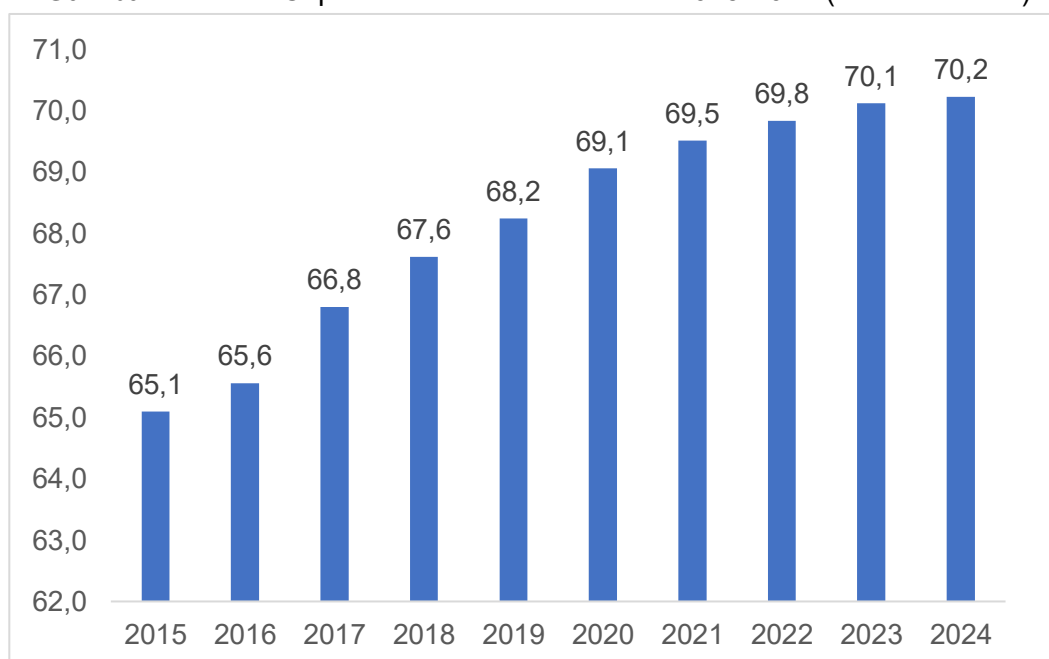
1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi agenda strategis dan prioritas fundamental bagi berbagai negara di dunia. Pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang menjadi pedoman bersama bagi negara-negara global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi dasar dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Malihah et al., 2025). Dalam laporan tahunan *The Sustainable Development Goals Report 2025* edisi ke 10 dijelaskan bahwa terdapat peningkatan kesejahteraan pada berbagai indikator pembangunan. Berdasarkan data terbaru 35 persen target ada di posisi yang tepat atau mengalami kemajuan yang signifikan, sementara separuhnya mengalami perubahan namun tidak signifikan serta 18 persen lainnya mengalami kemunduran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai capaian pembangunan berkelanjutan secara optimal (Reuters, 2024).

Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, serta kaya akan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam mengimplementasikan Pembangunan berkelanjutan. Integrasi Indonesia melalui perencanaan

pembangunan nasional dan daerah menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjawab tantangan global, sekaligus menghadapi kompleksitas masalah sosial ekonomi lingkungan seperti kemiskinan, pengangguran, serta dampak lingkungan dari industrialisasi (Michaela et al., 2025). Pada konteks evaluasi pencapaian pembangunan berkelanjutan, penggunaan indikator tunggal seperti produk domestik bruto (PDB), tidak lagi dianggap mampu karena PDB hanya menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara dan tidak memperhitungkan dimensi-dimensi penting lainnya, seperti kualitas kehidupan sosial dan aspek ekosistem lingkungan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini indeks pembangunan berkelanjutan yang digunakan adalah indeks pembangunan Indonesia yang disusun oleh (SDGscenter, 2025). Indeks ini merupakan indikator komposit yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga lebih representatif dalam mengukur capaian pembangunan berkelanjutan dibandingkan indikator tunggal.

Gambar 1.1 Skor Capaian IPB Indonesia Tahun 2015-2024 (Dalam Persen)



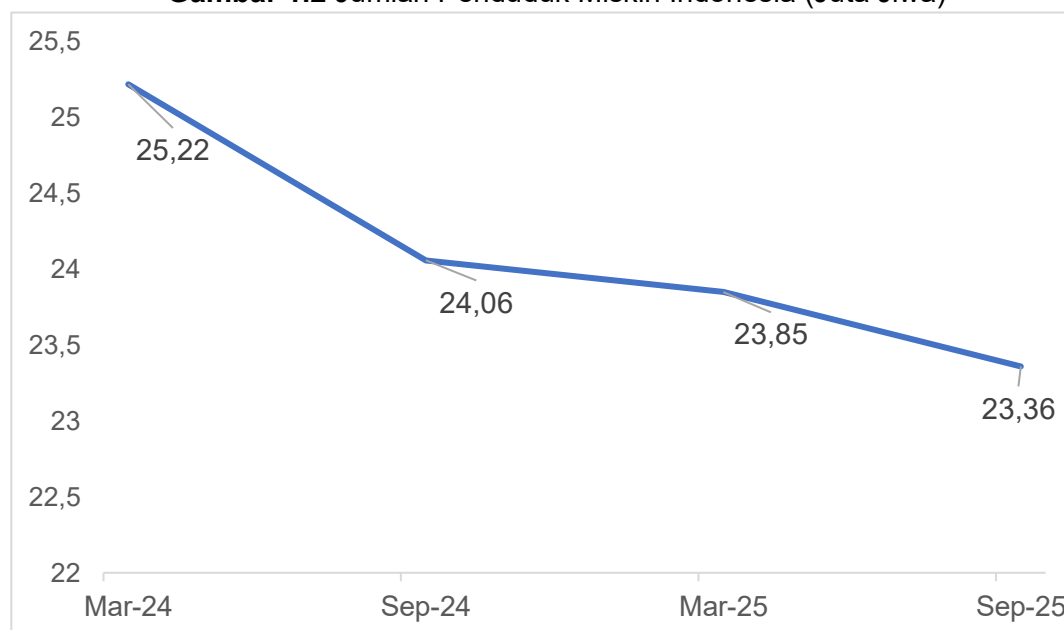
Sumber: data diolah 2026

Grafik perkembangan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) Indonesia periode 2015–2018 menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan skor naik dari 65,1 pada tahun 2015 menjadi 67,6 pada tahun 2018. Indeks ini digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai kerangka kebijakan nasional untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan integrasi indikator keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sesuai dengan temuan penelitian yang menekankan perlunya harmonisasi target pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan (Sofianto, 2019). Tren ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memperbaiki sinergi kebijakan lintas sektor yang esensial dalam menguatkan aspek sosial dan ekonomi pada IPB sejak implementasi pembangunan berkelanjutan dimulai. Selanjutnya, peningkatan IPB yang lebih signifikan pada rentang 2019 hingga 2021 dapat dihubungkan dengan penguatan tata kelola pembangunan dan integrasi indikator pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi, yang mempengaruhi kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut mencerminkan kemajuan pada indikator prioritas pembangunan berkelanjutan seperti pendidikan berkualitas, pengurangan kemiskinan, dan kualitas layanan dasar yang lebih baik, sebagaimana diamati dalam kajian determinan pembangunan berkelanjutan di 34 provinsi yang menunjukkan kontribusi determinan ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap perkembangan IPB (Sasmita et al., 2021).

Indonesia menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19 pada 2020 yang berdampak pada akses kesehatan dan kegiatan ekonomi, grafik tetap memperlihatkan tren kenaikan nilai IPB, yang mengindikasikan respons kebijakan yang adaptif terhadap tantangan pembangunan. Pada periode 2022 hingga 2024

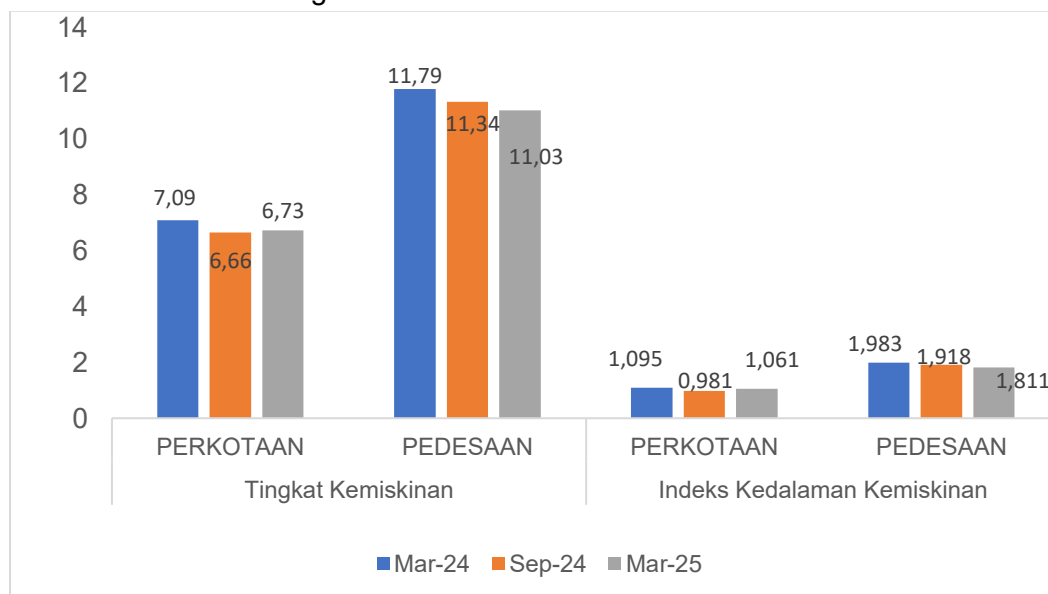
peningkatan IPB semakin konsisten, yang mencerminkan fase pemulihan pasca pandemi dan percepatan implementasi program keberlanjutan di berbagai sektor. Kenaikan indeks ini juga menunjukkan hubungan yang kuat antara pemajuan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif, sebagaimana didukung oleh studi literatur yang menelaah perkembangan dan tantangan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia sepanjang beberapa tahun terakhir (Novita et al., 2024). Secara keseluruhan, pola kenaikan IPB sepanjang satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa komitmen kebijakan nasional terhadap pembangunan berkelanjutan terus dijalankan melalui upaya yang semakin sistematis dan berbasis indikator, sekaligus menegaskan pentingnya kebijakan yang adaptif dalam menghadapi tantangan struktural dan situasional demi mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030. Namun demikian, peningkatan tersebut belum tentu mencerminkan capaian yang merata antar dimensi pembangunan sehingga perlu dianalisis determinan yang mempengaruhinya.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa)



Sumber: data diolah 2026

Fenomena kemiskinan yang termasuk dimensi sosial masih menjadi masalah utama yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pencapaian berbagai target dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) 1 berfokus pada pemberantasan kemiskinan dalam segala bentuk dan di mana pun. Menurut data terbaru BPS (2025) jumlah orang miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta, turun 0,49 juta dari Maret 2025 dan 0,70 juta dari September 2024. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan, namun perbedaan yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga akan menjadi tantangan. Data terkini di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 8,47 persen dari total penduduk, atau setara dengan 23,85 juta jiwa. Angka ini merefleksikan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, fenomena kemiskinan memiliki dampak yang luas, tidak terbatas hanya pada akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan, namun juga terkait dengan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Ketidaksetaraan ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi capaian pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, karena semakin sulit bagi individu dan komunitas yang terpinggirkan untuk mendapatkan peluang yang setara. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Saputri et al., 2025).

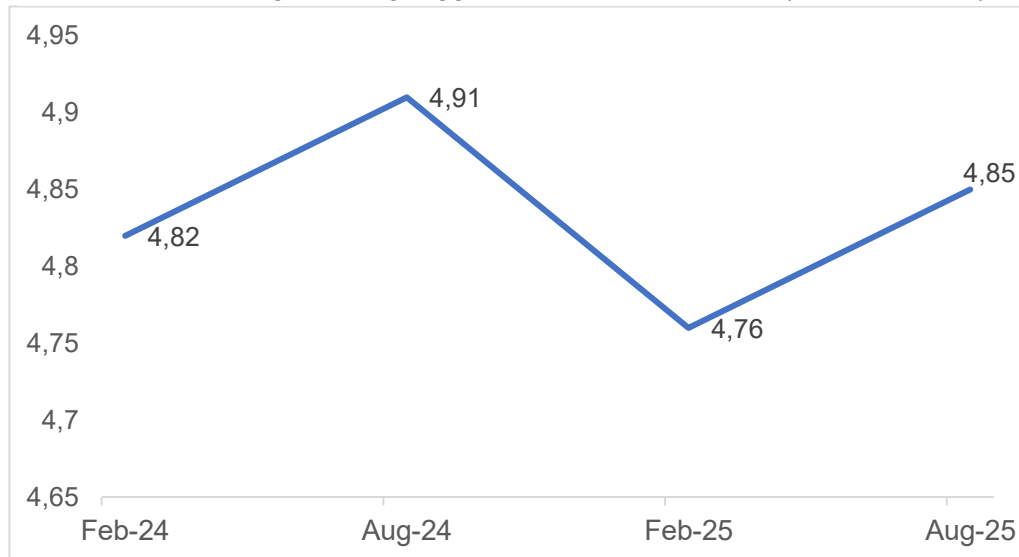
Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan & Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: data diolah 2026

Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin memunculkan tantangan yang kompleks. Pada Maret 2025 BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi yaitu sebesar 11,03 persen dari total populasi, sementara di wilayah perkotaan sebesar 6,73 persen. Persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dibandingkan september 2024, namun persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen dari periode sebelumnya. Selain itu juga terdapat indikasi bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan pada maret 2025 meningkat di perkotaan dibandingkan September 2024, yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin jauh dari garis kemiskinan (Khaerunnisa, 2025). Penelitian yang telah dilakukan oleh Musaddad et al (2025) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks SDGs. Kemiskinan yang bersifat multidimensi, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, memperlambat pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Dunia Tanpa

Kelaparan), dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Sementara itu penelitian dari Ordonez-Ponce (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan tidak signifikan secara statistik, yang mengindikasikan adanya kemungkinan perbedaan dalam metodologi atau konteks yang mempengaruhi hasil tersebut.

Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia (Dalam Persen)

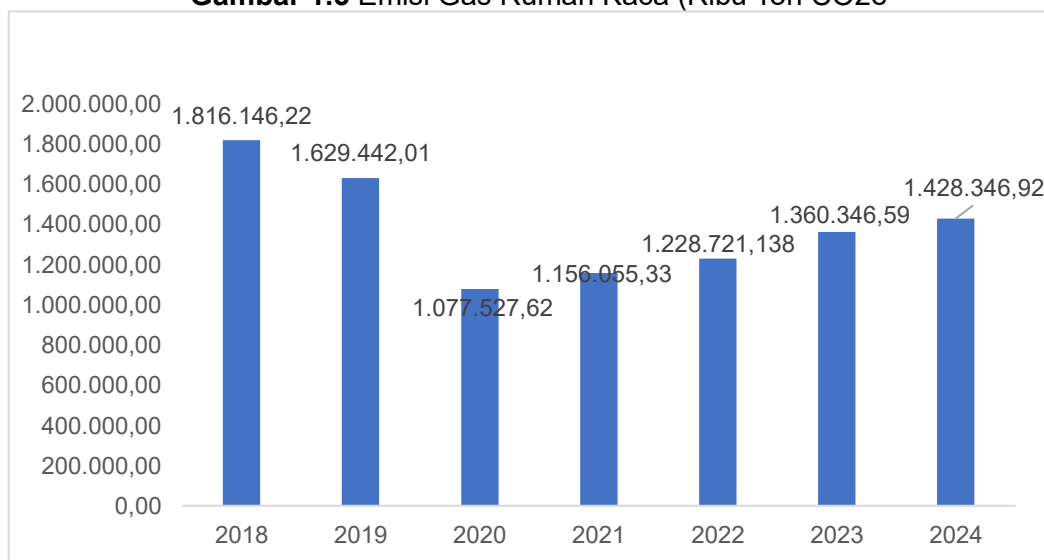


Sumber: data diolah 2026

Pengangguran yang termasuk dalam dimensi ekonomi menjadi salah satu indikator penting dari SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Menurut BPS (2025) Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia tercatat sebesar 4,85 % yang artinya sekitar 7,46 juta orang belum terserap oleh pasar tenaga kerja. Angka ini menunjukkan tren kenaikan sebesar 0,09 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 4,76 persen. Jumlah angkatan kerja yang bertambah menjadi 154 juta orang menunjukkan bahwa laju penciptaan lapangan kerja masih perlu diakselerasi untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Kondisi ini secara agregat menggambarkan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang mumpuni dan berkualitas di tengah dinamika perekonomian nasional (Sumanti et al., 2026). Pengangguran yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif, memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan, mengurangi

konsumsi rumah tangga dan investasi sosial (seperti pendidikan dan kesehatan), serta melemahkan ketahanan ekonomi. Dengan demikian tingkat pengangguran tidak hanya menjadi indikator ekonomi namun juga determinan penting dalam capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Soliman & Beram (2025) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap capaian pembangunan berkelanjutan. Kemajuan menuju SDG 8 dinilai dengan berbagai indikator salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka (Carlsen, 2021). Secara keseluruhan, mengatasi pengangguran merupakan hal mendasar untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik. Hal ini membutuhkan upaya kebijakan yang terkoordinasi yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan kejuruan, perlindungan sosial, dan mendorong lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua (Grimshaw & Kühn, 2019). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2019) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh tidak signifikan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1.5 Emisi Gas Rumah Kaca (Ribuan Ton CO₂e)

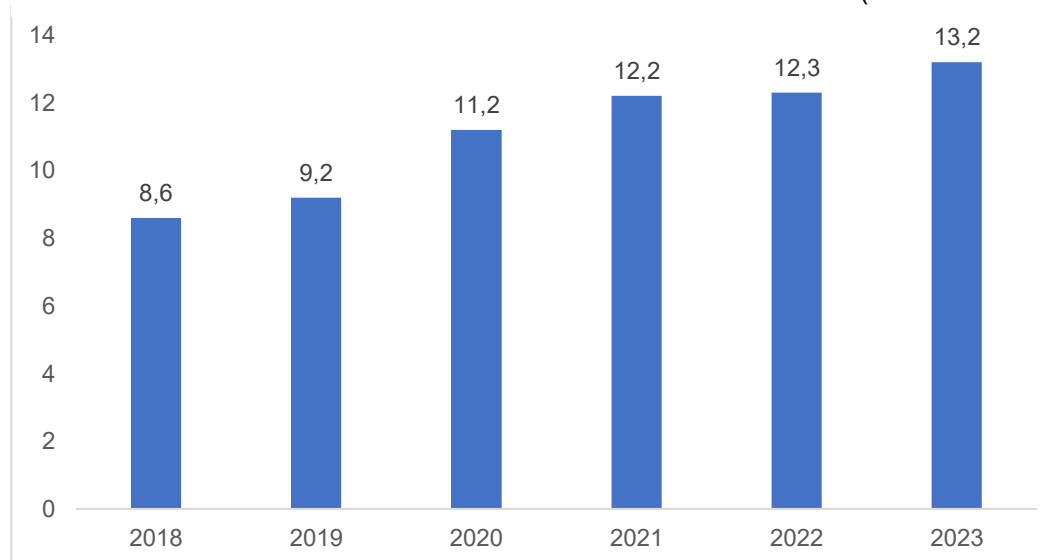


Sumber: data diolah 2026

Grafik di atas menunjukkan perubahan emisi gas rumah kaca dari tahun 2018 hingga 2023 dalam satuan ribu ton CO₂e. Pada tahun 2018, emisi as rumah kaca mencapai angka 1.816.146 ton, dan menurun ke angka 1.629.442 ton pada tahun 2019 dan kembali menurun kembali pada angka 1.077.527 ton di tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga 2024 emisi gas rumah kaca meningkat secara signifikan dari 1.156.055 ton menjadi 1.428.346 ton. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Perubahan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan lingkungan, dinamika ekonomi, dan pandemi yang terjadi pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika emisi gas rumah kaca di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan struktur energi nasional yang didominasi oleh energi fosil. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peningkatan emisi menjadi tantangan serius karena berkaitan langsung dengan pencapaian SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) mengingat Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan target pengurangan emisi GRK yang diperbarui dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (E-NDC) untuk tahun 2030. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek lingkungan menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam analisis capaian pembangunan berkelanjutan (Kementerian ESDM, 2024). Penelitian Sharma et al (2025) menemukan bahwa emisi GRK berpengaruh signifikan terhadap prioritas pencapaian SDGs, di mana industri dengan emisi tinggi seperti semen dan otomotif cenderung lebih fokus pada SDG lingkungan (SDG 6, 12, dan 13) sebagai bentuk respons terhadap dampak operasional mereka, sehingga tingkat emisi menjadi faktor pembeda utama dalam kontribusi industri terhadap pembangunan

berkelanjutan. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh He et al (2025) menjelaskan bahwa emisi gas rumah kaca tidak berpengaruh secara langsung terhadap capaian pembangunan berkelanjutan, karena yang menentukan justru adalah kebijakan mitigasi. Pengurangan emisi terbukti memberikan manfaat positif bagi berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan seperti kesehatan, energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi. Tantangan dalam jangka panjang terletak pada upaya dekarbonisasi yang berkelanjutan, karena mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, di mana batu bara masih mendominasi bauran energi primer Indonesia (Purwowidhu, 2023).

Gambar 1.6 Realisasi Bauran EBT Indonesia tahun 2018-2023 (Dalam Persen)



Sumber: data diolah 2026

Grafik di atas menunjukkan perkembangan realisasi bauran energi baru terbarukan pada tahun 2018 sampai 2023. Pada tahun 2018 realisasi bauran EBT tercatat sebesar 8,6 persen kemudian meningkat 0,6 poin menjadi 9,2 di tahun 2019. Realisasi bauran EBT terus meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,2 meningkat lagi di angka 12,2 di tahun 2021 dan 12,3 di tahun 2022. Pada tahun 2023 realisasi EBT berada di angka 13,2 persen, ini menunjukkan adanya komitmen dan progres dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Ketergantungan pada energi fosil tentunya berkaitan secara langsung dengan tantangan dalam mencapai SDG 7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau. Komitmen nasional dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025 mengalami hambatan yang signifikan. Realisasi bauran EBT pada tahun 2024 baru mencapai 14,68 persen, hal itu mengakibatkan target nasional untuk 2025 direvisi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) menjadi antara 17-20 persen (Wuryandani, 2025). Oleh karena itu, bauran energi terbarukan menjadi variabel penting dalam menjelaskan dinamika capaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian Karimboev et.al (2025) menemukan bahwa EBT berpengaruh signifikan terhadap pencapaian SDGs. Sementara itu penelitian Aboul-Atta & Rashed, (2021) menemukan bahwa produksi energi baru terbarukan justru berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan. Target awal 23 persen untuk tahun 2025 kini diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2030. Hambatan utama dalam transisi energi ini adalah kendala infrastruktur, seperti ketersediaan jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik dari sumber energi baru terbarukan. Selain itu isu regulasi seperti Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga mempengaruhi pengembangan EBT. Oleh karena itu, mempercepat transisi energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju penggunaan energi baru terbarukan bukan hanya penting untuk mencapai target bauran energi, tetapi juga krusial dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi tujuan keberlanjutan energi jangka panjang Indonesia. Dengan menyelesaikan kendala yang ada, Indonesia dapat lebih dekat kepada pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan yang diharapkan dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (Tasliman et al., 2024).

Penelitian terdahulu di Indonesia sejauh ini cenderung fokus pada hubungan parsial antar variabel seperti pertumbuhan ekonomi dan emisi atau pengangguran dan kemiskinan secara terpisah, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Djuno et al (2024) yang hanya mengkaji capaian pembangunan berkelanjutan pilar kemiskinan dan Rohima (2024) yang menilai hubungan pengangguran dan faktor ekonomi lain terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, hanya fokus pada satu pilar bukan pada indeks komposit dan masih sangat terbatas penelitian yang menggunakan indeks pembangunan berkelanjutan sebagai variabel dependen komposit yang dipengaruhi oleh variabel sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Selain itu, hasil penelitian yang tidak konsisten menunjukkan adanya perbedaan temuan yang dipengaruhi oleh metode dan konteks penelitian. Oleh karena itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menggunakan pendekatan komprehensif berbasis *time series* di Indonesia, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengisi gap tersebut.

Metode *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* sangat relevan untuk menjawab gap tersebut karena mampu mengurai efek jangka pendek dan jangka panjang antar variabel deret waktu, serta memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh determinan sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan serta sesuai dengan karakteristik data *time series* Indonesia yang memungkinkan adanya perbedaan tingkat stasioneritas antar variabel. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu *Determinan Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia : Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengaruh emisi gas rumah kaca terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Bagaimana pengaruh energi baru terbarukan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk menganalisis pengaruh emisi gas rumah kaca terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk menganalisis pengaruh energi baru terbarukan terhadap indeks pembangunan berkelanjutan di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sumber informasi serta kontribusi terhadap pengembangan penelitian mengenai determinan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta memberikan kontribusi empiris terhadap literatur pembangunan berkelanjutan berbasis pendekatan time series.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi ekonomi mengenai pembangunan berkelanjutan.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian agar hasil penelitian yang diharapkan tidak keluar dari pokok pembahasan. Penelitian ini dilakukan di negara Indonesia selama 25 tahun pada periode 2000-2024 dengan menggunakan data time series. Penelitian ini juga dibatasi oleh variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Berkelanjutan dan empat variabel bebas yaitu Kemiskinan, Pengangguran, Emisi Gas Rumah Kaca, dan Energi Baru Terbarukan yang merupakan indikator utama capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.